

	News Title : Strategi Rancangan Kebijakan Ekspor CPO Melalui Bursa Berjangka	
	Media Name : Swa.co.id	Journalist : Audrey Aulivia W
	Publish Date : 30 June 2023	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 3,000,000
	Resources : Olvy Andrianita (Sekretaris Bappebti), Isy Karim (Plh Kepala Bappebti), Juan Permata Adoe (Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan)	Ads Value : 1,000,000
	Section/Rubrication : Trends	Topic : Ekspor CPO

Strategi Rancangan Kebijakan Ekspor CPO Melalui Bursa Berjangka

by Audrey Aulivia W - June 30, 2023



Ilustrasi produk crude palm oil. (dok. Antara Foto)

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kembali menyelenggarakan kegiatan Konsultasi Publik Kebijakan Ekspor Minyak Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil/CPO*) Melalui Bursa Berjangka di Indonesia yang di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (26/6). Acara dipimpin Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita mewakili Plh Kepala Bappebti dan dihadiri para pemangku kepentingan sektor kelapa sawit, di antaranya pelaku usaha, asosiasi, dan juga perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

Plh Kepala Bappebti Isy Karim menjelaskan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut konsultasi publik yang dipimpin Menteri Perdagangan pada 5 Juni 2023 lalu. "banyak masukan dan perhatian yang disampaikan pelaku usaha dalam kegiatan tersebut, sehingga kami kembali mengadakan konsultasi publik lanjutan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait rancangan kebijakan yang sedang disusun," ujarnya.

Isy mengutarakan, ekspor *CPO* melalui bursa berjangka diharapkan dapat menciptakan bank data *CPO* yang akurat serta sejalan dengan amanah Undang-undang Nomor 32/1997 sebagaimana diamandemen menjadi Undang-undang Nomor 10/2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) yang menegaskan bahwa salah satu tujuan PBK adalah sebagai sarana penciptaan harga (*price discovery*) dan pembentukan harga acuan (*price reference*) yang transparan. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan pula oleh Menteri Perdagangan dalam arahan beliau pada Rapat Kerja Bappebti dan Kementerian Perdagangan Tahun 2023.

Nantinya, bursa *CPO* yang ditunjuk pemerintah harus terpercaya, baik di pasar domestik maupun internasional. Selain itu, juga harus mampu memberikan layanan yang optimal kepada pelaku usaha. Biaya transaksi *CPO* di bursa juga harus kompetitif atau minimal sama dengan biaya transaksi *CPO* yang dilakukan selama ini oleh pelaku usaha Indonesia di bursa Malaysia.

Diharapkan, kebijakan yang akan dijalankan dapat diimplementasikan dengan mempertimbangkan kontrak jangka panjang (*long term contract*) dan mudah dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, diperlukan pelatihan dan sosialisasi terkait tata cara serta mekanisme ekspor melalui bursa berjangka kepada pelaku usaha.

Dalam kegiatan konsultasi ini juga dilakukan sesi pemaparan yang dimoderatori Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan Juan Permata Adoe. Sesi ini menampilkan paparan konsep Rancangan Peraturan Bappebti tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdagangan Pasar Fisik untuk Ekspor *CPO* di Bursa Berjangka dan paparan konsep Peraturan Tata Tertib (PTT) Bursa oleh Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita, serta paparan konsep Rancangan Permendag dan Bisnis Proses Ekspor *CPO* melalui Bursa Berjangka oleh Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Ditjen Daglu) Farid Amir.

Dalam paparannya, Farid Amir, Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Ditjen Daglu menerangkan, ekspor melalui bursa berjangka komoditi hanya akan mengatur *CPO* dengan HS 15111000 dan tidak termasuk produk turunannya. Hal ini dipilih karena *CPO* tersebut volumenya tidak terlalu besar, sehingga saat implementasi tidak menimbulkan goncangan yang terlalu besar pula.

"Selain itu, pihak-pihak yang berhak melakukan ekspor adalah Eksporir Terdaftar (ET) dan memiliki Hak Ekspor (HE) yang diperoleh dari pemenuhan atas kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan/atau dari pihak yang mengalihkan HE atas pemenuhan DMO," jelas Farid dikutip dalam keterangannya, Jumat (30/06/2023).

Farid juga menjelaskan, alur bisnis proses dari kebijakan ekspor *CPO* melalui bursa berjangka tidak ada perubahan yang signifikan. Pada kebijakan ini ada penambahan satu proses sebelum ekspor dilakukan ekspor *CPO*, yaitu harus ditransaksikan di bursa berjangka untuk kemudian diterbitkan bukti pembelian *CPO* oleh bursa. Bukti pembelian ini adalah dokumen yang akan digunakan dalam pemrosesan Persetujuan Ekspor (PE).

Dalam kesempatan yang sama, Olvy Andrianita, Sekretaris Bappebti menjelaskan Rancangan Peraturan Bappebti dan Rancangan Peraturan dan Tata Tertib Bursa. Menurutnya, Rancangan Peraturan Bappebti tentang Petunjuk Teknis Perdagangan Pasar Fisik untuk Ekspor *CPO* yang mengatur, antara lain tata kelola bursa *CPO* dan lembaga kliring *CPO*, persyaratan perizinan bursa *CPO* dan lembaga kliring *CPO*, tata cara perdagangan di bursa *CPO*, mekanisme pengawasan oleh Bappebti dan bursa *CPO*, mekanisme penyelesaian perselisihan dan *force majeure*.

Sementara, Peraturan Tata Tertib (PTT) ekspor *CPO* melalui bursa berjangka berisi ketentuan lebih teknis yang mencakup persyaratan dan tata cara penerimaan peserta penjual/peserta pembeli, hak dan kewajiban peserta penjual/peserta pembeli, biaya jaminan transaksi, mekanisme pengawasan, mekanisme penyerahan fisik *CPO* dan *force majeure*.

"Dalam prosesnya, ketiga kebijakan/ketentuan teknis tersebut harus komprehensif dan sinergis sehingga perlu mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan. Kebijakan ekspor *CPO* juga harus selaras dengan kebijakan pemenuhan kebutuhan *CPO* dalam negeri, sehingga tidak memberatkan pelaku usaha," terang Olvy.

Juan Permata Adoe, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan menyampaikan, kebijakan- kebijakan yang dibuat harus dapat diterima oleh pelaku usaha. "Selain itu, diharapkan penghasilan devisa dari *CPO* ini dapat stabil. Sehingga, kebijakan ekspor *CPO* melalui bursa ini berdampak positif bagi industri," ungkap Juan.